

STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA BITUNG

*Morin Benjamin*¹
*Agustinus Pati*²
*Frans Singkoh*³

Abstrak

Masih tingginya angka putus sekolah di Kota Bitung menjadi suatu indikator masih lemahnya kinerja Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan melalui strategi yang diterapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian sebanyak 11 (sebelas) informan yaitu 1 orang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, 4 orang UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan, 3 orang Kepala Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA, dan 3 orang masyarakat khususnya orang tua anak putus sekolah. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi, dan Studi Pustaka, Teknik Analisa Data yang dipakai yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan, maka penelitian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung yaitu strategi sudah cukup baik dalam menekan angka anak putus sekolah, antara lain : Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bitung, Pemberian bantuan dana, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program PIP (Program Indonesia Pintar), Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah), dan Sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci : Strategi, Dinas Pendidikan, Anak Putus Sekolah.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Pendidikan di era globalisasi, bukanlah hal yang baru, sebab pendidikan adalah bagian yang tak dapat dipisahkan seiring dengan perkembangan zaman, bahkan merupakan suatu kebutuhan primer, dimana setiap orang akan berjuang, berkompetisi untuk dapat menikmati pendidikan setinggi mungkin. Hal ini dilakukan agar dapat menghadapi dan sekaligus membentengi diri di tengah-tengah derasnya pengaruh globalisasi. Dengan berpendidikan, seseorang maupun masyarakat Indonesia akan semakin cerdas dan terhindar dari ketidakmampuan baik secara moril maupun materil. Itulah sebabnya, seseorang yang telah menikmati jenjang pendidikan yang tinggisama halnya dengan ia telah menginvestasikan masa depan yang baik, budi pekerti yang luhur dalam dirinya. Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dimana tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di Negara tersebut haruslah tinggi pula. Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah tidak dapat meneruskan pendidikannya lebih khusus pendidikan dasar (putus sekolah).

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya pencerdasan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar. Bagaimana respons pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, karena secara tidak langsung orang yang tidak

mengenyam pendidikan ataupun sudah dapat mengenyam pendidikan akan tetapi putus di tengah jalan. Bisa saja berasal dari anak-anak yang cerdas, bahkan sebaliknya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan membentuk sikap mental manusia kepada perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama. Hal ini jelas telah di amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan daerah, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 2014). Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan. Hal ini tentunya

sesuai dengan peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam membangkitkan kemampuan dan kesadarannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.

Demikian pula dengan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15). Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang dibidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dapat diartikan bahwa program desentralisasi pendidikan dengan kewenangan dan sumber dana finansial yang lebih besar merupakan jalan terang bagi pemerintahan kabupaten / Kota dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, baik itu dalam pemerintahan, maupun dalam bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten / Kota dan Dinas Pendidikan dapat membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap

masyarakat. Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah yang satu dengan daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan, pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan dasar.

Data Dinas Pendidikan menunjukkan masih adanya kondisi anak putus sekolah yang terjadi di Kota Bitung setiap tahunnya menjadi ironi bagi pemerintah daerah, dimana kondisi anak putus sekolah pada tahun 2016 mencapai angka 380 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah. Kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan data masih

ditemukannya anak putus sekolah di Kota Bitung, menjadikan Pemerintah kota bekerja keras untuk dapat meminimalisir angka anak putus sekolah tersebut. Diperlukan upaya, usaha, langkah dan strategi yang efektif dari dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Bitung untuk dapat mendata secara pasti jumlah anak putus sekolah dimasing-masing kelurahan, mengetahui alasan sampai terjadi anak putus sekolah apakah disebabkan oleh ketiadaan biaya, atau pemahaman dari orang tua yang memang tidak mau untuk menyekolahkan anak, karena harus membantu orang tua untuk mencari nafkah, atau memang hal yang disengaja karena memang sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah.

Alasan-alasan penyebab terjadinya anak putus sekolah di Kota Bitung harus disikapi dengan serius oleh pemerintah kota, apabila tidak dilakukan strategi untuk mengatasinya akan menimbulkan lemahnya Sumber Daya Manusia khususnya yang ada di Kota Bitung. Berdasarkan permasalahan inilah peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian Strategi Dinas Pendidikan dalam meminimalisir anak putus sekolah di Kota Bitung.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Dinas Pendidikan dalam meminimalisir anak putus sekolah di Kota Bitung? Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung.

Tinjauan Pustaka

Don Harvey dalam bukunya yang berjudul: "Business policy and Strategic Management", menyatakan

pandangan-pandangan berikut tentang manajemen strategik. Manajemen strategik berhubungan dengan proses memilih strategi dan kebijakan dalam rangka upaya memaksimalkan sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan. Manajemen strategik meliputi semua aktivitas yang menyebabkan timbulnya perumusan sasaran-sasaran organisasi, strategi-strategi dan pengembangan rencana-rencana, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategik tersebut untuk organisasi yang bersangkutan secara total (Nisjar, Karhi & Winardi, 1997:85).

Adapun fokus manajemen strategik adalah pada lingkungan eksternal dan pada operasi-operasi pada masa datang. Manajemen strategi mendeterminasi arah jangka panjang organisasi yang bersangkutan dan menghubungkan sumber-sumber daya organisasi yang ada dengan peluang-peluang pada lingkungan yang lebih besar. Manajemen Strategis (Strategic Management) merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategi yang akan menghasilkan kesesuaian superior.

Dua orang dari pakar Manajemen Strategis, A. Bakr Ibrahim dan Kamal Arghyed dalam Azhar Arsyad, (2003:26) mengemukakan definisi berikut: "*Strategic Management is the systematic and continuous process of selecting, implementing, and evaluating strategic choices. These decisions must be congruent with the organization's mission, objective, and internal and external capabilities, for they will set the tone for the entire organization.*"

Kata kunci dalam ungkapan di atas tidak terlepas dari kata strategi itu sendiri, misi, objektif, serta kapabilitas internal dan eksternal. Proses

manajemen strategis menuntut para manajer untuk memeriksa dan mengontrol situasi lembaga atau perusahaannya secara periodik, mengevaluasi misi dan tujuannya, menilai lingkungan eksternalnya ditinjau dari sudut situasi ekonomi, perubahan struktur, kompetisi, inovasi teknologi di samping menilai kemampuannya ke dalam, seperti sumber daya manusianya, kualitas produksi atau luarannya, keterampilan dan teknik-teknik pemasarannya serta performan keuangan.

Sondang P. Siagian (2005:15) dalam merumuskan suatu strategi manajemen puncak harus memperhatikan berbagai faktor yang sifatnya kritical. *Pertama*: Strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi karena manajemen puncak menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembedaan keberadaan organisasi, filosofi yang bagaimana yang akan digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi tersebut dan sasaran apa yang ingin dicapai. Yang jelas menonjol dalam faktor pertama ini ialah bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal disekolah dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan

individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 disebutkan: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pandangan pengertian pendidikan menurut SA Bratanata sebagaimana yang dikutip oleh Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati, adalah "usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan". Abu Ahmadi juga menambahkan, bahwa pendidikan merupakan hal yang lebih menekankan dalam hal praktek, yaitu menyangkut kegiatan belajar dan mengajar. Oleh karena itu untuk mencapai mutu pendidikan, maka ditanamkan pola pendidikan dasar 9 tahun, dimulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutam Tingkatan Pertama (SLTP).

Berdasarkan pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian informasi yang berlangsung dalam situasi komunikasi antar manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan;
- 2) Menciptakan pola daya pikir yang sama;
- 3) Menciptakan dan mengembangkan metode spesifikasi yang lebih baik; dan
- 4) Membina masyarakat daerah setempat.

Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan, bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempatan hidup. Kehidupan dan penghidupan anak didik selaras dengan dunianya. Pendidikan yang kita inginkan saat ini ialah pendidikan pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan setiap anggota masyarakat untuk dapat berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang telah dikembangkan di dalam dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalamnya untuk diberdayakan.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam

arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Menurut Amin Duien Indra Kusuma, pengertian pendidikan itu harus terkandung hal-hal yang pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pendidikan itu tidak lain adalah merupakan suatu usaha dari manusia;
2. Bahwa itu dilakukan dengan sengaja atau sadar;
3. Bahwa usahanya itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa bertanggung jawab kepada hari depan anak didiknya.
4. Bahwa usahanya berupa bantuan untuk bimbingan rohani dan dilakukan secara teratur dan sistematis;
5. Bahwa yang menjadi objek pendidikan itu adalah anak/ peserta didik yang masih dalam pertumbuhan/perkembangan atau memerlukan pendidikan;
6. Bahwa batas/sasaran akhir pendidikan adalah tingkat dewasa atau kedewasaan.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai anak yang orang tuanya karena suatu

sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial. Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat (MC Millen Kaufman, dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya. Ary H. Gunawan (2010:71) menyatakan bahwa “putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya”. Hal ini berarti, putus sekolah ditujukan kepada seseorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Hal senada diungkapkan oleh Nazili Shaleh Ahmad (2011:134) bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu “berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah”. Hal ini berarti putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat

dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. Dasar penelitian adalah pendekatan studi kasus, artinya penulis akan meneliti satu unit sosial yang berkaitan dengan fokus permasalahan secara lebih mendalam. Penulis menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang ada dinamis dan kompleks.

Fokus dalam penelitian ini adalah strategi Dinas Pendidikan dalam meminimalisir anak putus sekolah di Kota Bitung, yaitu segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah dan pengambil kebijakan yang ada di Kota Bitung terhadap anak putus sekolah. Hal ini dapat dikaji sebagai berikut:

1. Strategi yang berkaitan dengan menekan angka anak putus sekolah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun Keputusan Walikota Bitung.
2. Strategi dalam bentuk bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan lembaga pendidikan di setiap jenjangnya. Baik berupa bantuan finansial dan motivasi-motivasi dalam menekankan pada pentingnya proses pendidikan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti, dengan demikian

yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung 1 orang.
2. UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan-Kecamatan 4 orang
3. Kepala Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA 3 orang
4. Masyarakat khususnya orang tua anak putus sekolah 3 orang

Dalam penelitian, selanjutnya dilapangan memungkinkan informan bertambah (snowball sampling) disebabkan informan tersebut dapat memberikan informasi mengenai data penulisan yang dibutuhkan.

Hasil Penelitian

Seiring dengan gencarnya upaya Pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka hal yang masih membutuhkan perhatian khusus berkaitan dengan dunia pendidikan adalah kondisi anak putus sekolah di kota Bitung. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, sampai dengan tahun 2016 jumlah anak putus sekolah di Kota Bitung sebanyak 410 anak dari berbagai jenjang. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Maesa, Bpk. Alpion Takalawengan, SPd (45 thn) mengatakan bahwa: "Tahun 2016, data anak putus sekolah di kecamatan Maesa tercatat mencapai angka 103 anak dari berbagai jenjang pendidikan,. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka telah terjadi sedikit penurunan. Kami akan terus menerus berupaya untuk menekan dan mengikis jumlah anak putus sekolah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah kepada masyarakat".

Meskipun tidak menunjukkan angka yang super fantastis namun, adanya anak usia sekolah yang berhenti

belajar di sekolah sebelum waktunya atau putus sekolah diberbagai jenjang, ikut mengindikasikan bahwa masih saja ada orangtua yang belum memahami betapa pentingnya nilai sebuah pendidikan bagi seorang anak dalam keluarga. Bahkan, peranan orang tua untuk menjadi motor penggerak semangat bagi anak agar mau bersekolah jauh dari yang diharapkan. Beberapa hasil wawancara yang ditemui dilapangan menunjukkan alasan yang dikedepankan oleh orang tua sehingga memutuskan anaknya untuk berhenti sekolah.

Pertama, kasus yang terjadi di SD GMIM 2 Madidir, Kecamatan Madidir, berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah ibu Revellyn Ch. Rapar Spd M.MPd (46 Thn) Peneliti mengetahui bahwa terdapat seorang anak yang putus sekolah, yakni siswa kelas V (lima) atas nama Ramli Lombontariang. Anak tersebut tidak lagi kembali bersekolah, dan setelah ditelusuri oleh pihak sekolah, ternyata ia sudah bekerja disebuah tempat pencucian kendaraan bermotor. Upaya pihak sekolah menghubungi orang tua agar anaknya dapat kembali bersekolah seperti teman-temannya, namun tidak mendapat respons positif. Bahkan informasi yang didapat dari anak yang bersangkutan bahwa ia bekerja karena ingin memiliki penghasilan sendiri, tetapi juga ingin membantu keadaan ekonomi orang tuanya.

Kedua, kasus yang terjadi di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa, tepatnya di SD GMIM 4 Bitung sedikit berbeda. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, Ibu. Jenny Kainde, Sth Mth (53 thn) peneliti mengetahui bahwa di SD GMIM 4 Bitung terdapat satu anak yang berhenti atau putus sekolah di kelas IV (empat)

atas nama Adri Budiman. Siswa tersebut yang tergolong anak yang berbakat, meskipun prestasinya tidak menonjol. Tetapi kemudian ia menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya, yaitu sering melamun, menjadi pendiam dan suka berbolos hingga akhirnya tidak pernah kembali ke sekolah. Hasil penelusuran pihak sekolah kepada orang tua ternyata telah terjadi disharmonis dalam keluarga. Keretakan rumah tangga, ikut mempengaruhi psikologi anak, sekaligus menjadi pemicu bagi anak untuk mengambil keputusan yang “keliru“ yakni meninggalkan sekolah tempat dimana ia sedang dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk meraih masa depan yang baik.

Ketiga, kasus yang terjadi di Kelurahan Wangurer Utara, terjadi pada keluarga Bapak Ruben Sumuhude (62 thn) dan Ibu Martje Lahungkondo (57 thn), yang memiliki 5 orang anak (3 laki-laki dan 2 perempuan). Anak pertama dan keduanya tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, anak ketiganya menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar dan 2 anak perempuannya sementara mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar. Saat diwawancarai, Ibu Martje menjelaskan bahwa anaknya terpaksa harus berhenti sekolah. Mereka tidak dapat menikmati pendidikan diberbagai jenjang karena kondisi ekonomi keluarga, dimana suaminya yang hanya bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap serta kondisi kesehatan suaminya yang sangat memprihatinkan, membuat mereka harus mengorbankan kesempatan untuk menimba ilmu disekolah.

Keempat, kasus anak putus sekolah yang terjadi di Kelurahan Wangurer Barat ini terdapat beberapa

keluarga yang memiliki anak putus sekolah. Salah satunya yang terjadi pada keluarga bapak Yohanis Saluh (44 thn) seorang Tukang ojek dan Ibu Juli Salema (42 thn) yang memiliki 3 orang anak laki-laki, dimana anak pertama dan kedua hanya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, sedangkan anak ketiganya yang sementara mengenyam pendidikan di kelas 2 SMP Negeri2Bitung terpaksa berhenti. Saat diwawancarai, ibu Juli yang hanya mengecap pendidikan sampai kelas 3 Sekolah Dasar, mengaku bahwa anak-anaknya berhenti sekolah karena mengikuti jejak ayahnya yang dulu hanya sampai pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Selain itu, ibu Juli mengatakan bahwa terlalu banyak biaya yang harus disiapkan untuk menyekolahkan anaknya tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh setiap hari.

Kelima, kasus yang terjadi di Kelurahan Pinokalan ini terdapat beberapa keluarga yang anaknya putus sekolah. Salah satunya terjadi pada Rico anak pertama dari 4 bersaudara dari Bapak Edy Subianto (59 thn) dan Ibu Julin Katiandagho (57 thn) yang tiba-tiba enggan bahkan harus berhenti sekolah sebelum waktunya di SMPN 3 Bitung. Saat diwawancarai ibu Julin menjelaskan bahwa anaknya terpengaruh dengan teman-teman seusia yang ada disekitarnya, yang sebagian besar sudah putus sekolah. Sebagai orang tua, mereka sudah berusaha membujuk, tetapi anak mereka tetap tidak ingin bersekolah lagi, dan beralasan ingin mencari pekerjaan apa saja.

Dari beberapa kasus anak putus sekolah di Kota Bitung sebagaimana diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya anak berhenti sekolah atau putus sekolah Bukan karena kurangnya fasilitas

pendidikan serta perhatian Pemerintah terhadap pendidikan. Melainkan justru yang perlu untuk dikaji lebih dalam lagi adalah faktor:

1. Lemahnya Ekonomi Keluarga

Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak “sering dilibatkan” untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tanpa disadari ikut mengganggu kegiatan belajar anak. Selain itu, cara mudah dan cepat untuk mendapatkan upah dari suatu pekerjaan membuat anak tergiur untuk meninggalkan sekolah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Drs. Julius Ondang MPd (55 thn), yang mengatakan bahwa: “di Kota Bitung sendiri, masih saja ada masyarakat yang kurang memberi perhatian terhadap pentingnya pendidikan, hal ini ditandai dengan anak yang berhenti sekolah dengan alasan untuk membantu orang tua bekerja atau berdagang. Pemerintah dengan berbagai cara sudah berupaya meningkatkan mutu pendidikan, tapi masyarakat belum mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan”.

2. Keadaan Keluarga Yang Tidak Harmonis

Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat, lingkungan yang paling pertama dan utama dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu pendidikan di keluarga yang mencerahkan dan mampu membentuk karakter anak yang baik dan kreatif adalah modal penting bagi kesuksesan anak di masa depan. Orang tua merupakan memiliki peranan sangat penting dalam menunjang hak anak terhadap pendidikannya. Karena itu, interaksi yang baik antara orang tua dan anak ikut menjadi modal bagi pencapaian masa depan yang gemilang

dari si anak. Sebaliknya, hubungan keluarga tidak harmonis dapat berimbas terhadap pertumbuhan mental dan spiritual anak. Bahkan mendorong anak mengambil keputusan yang “keliru” untuk masa depannya.

3. Lingkungan Sekitar

Salah satu faktor yang ikut menopang keberlangsungan kegiatan dan proses belajar/ pendidikan adalah lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan yang tentram, nyaman, damai akan memberikan pengaruh yang baik kepada anak. Sebaliknya, lingkungan yang tidak tertata dengan baik sehingga tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman hanya akan membuat seseorang kehilangan semangat, dan ikut berpengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan cara bertindak. Kehadiran seorang atau beberapa orang teman dalam pergaulan disekitar lingkungan tempat tinggal pasti akan memberi dampak yang positif maupun negatif bagi anak. Karena itu, dibutuhkan peranan orangtua untuk mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, sekaligus memberikan perhatian ekstra kepada anak agar tidak mudah terpengaruh terhadap di lingkungan yang ada disekitarnya sehingga menjadi budak dalam pergaulan..

Lingkungan tempat tinggal anak atau tempat dimana anak berinteraksi dapat berperan dalam membina kepribadian anak-anak kearah yang lebih positif. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan memberi motivasi yang kuat bagi setiap anak untuk menikmati kesempatan memperoleh pendidikan.

4. Pemahaman masyarakat akan pendidikan

Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan ikut berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan di bangku

sekolah. Pemahaman masyarakat modern tentu berbeda dengan masyarakat yang tradisional. Dalam kehidupan masyarakat modern, pendidikan dipahami sebagai sebuah keharusan dan kewajiban untuk dijalani oleh setiap individu. Pendidikan dilakukan tanpa ada batas waktu (Long life education). Pencapaian prestasi anak sebisa mungkin dapat melampaui apa yang dicapai orangtuanya. Sebaliknya, kehidupan masyarakat tradisional sangat “terikat” dengan budaya. Pada umumnya masyarakat tradisional kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga kebanyakan anak-anak mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan putus di tengah jalan. Bahkan ada yang menganggap bahwa tingkat pendidikan anak tidak boleh melampaui orangtuanya. Bagi sebagian masyarakat tradisional mengikuti proses pendidikan secara berjenjang disekolah hanyalah menghabiskan waktu. Sekolah tidak menjamin orang bisa hidup mewah atau miskin, karena ada orang yang tidak sekolah tapi bisa hidup mewah karena mereka bekerja, namun tak jarang ada yang bersekolah tapi sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang penting sudah bisa menulis, berhitung dan membaca, selebihnya belajar bagaimana bisa mendapatkan uang agar dapat membantu orangtua. Pola pikir yang seperti inilah yang membuat sebagian kecil masyarakat bersikap apatis terhadap pendidikan.

Kesimpulan

1. Salah satu cara yang paling efektif untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melalui pendidikan. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan

nasional mereka. Di kota Bitung, peranan dan kepedulian pemerintah terhadap anak putus sekolah sudah sangat nyata. Ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah terhadap masa depan anak. Adapun strategi pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain :

- 1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bitung.
 - 2) Pemberian bantuan dana
 - 3) Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin
 - 4) Program BSM (Bantuan Siswa Miskin)
 - 5) Program PIP (Program Indonesia Pintar)
 - 6) Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah)
 - 7) Sosialisasi kepada masyarakat
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah
- Kondisi obyektif (gambaran umum) mengenai studi anak putus sekolah yang terjadi di Kota Bitung di tahun 2016 mencapai angka 410 anak, yang kemudian terbagi di beberapa tingkatan pendidikan sekolah, di tingkat SD jumlah anak putus sekolah berjumlah 198 anak, di tingkat SMP berjumlah 174 anak, dan di tingkat SMA berjumlah 38 anak. Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah antara lain:
- 1). Kurangnya minat anak untuk bersekolah
 - 2) Keadaan keluarga yang tidak harmonis
 - 3) Lemahnya ekonomi keluarga

- 4) Kondisi lingkungan tempat tinggal anak
- 5) pemahaman masyarakat akan pendidikan

Saran

1. Untuk menekan angka anak putus sekolah, maka pendataan mengenai anak putus sekolah harus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah di Kota Bitung. Data ini, kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam menekan angka anak putus sekolah.
2. Pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi, edukasi yang sifatnya berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenyam pendidikan diberbagai jenjang bagi setiap anak usia sekolah untuk menghindari anak putus sekolah di Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A. dan Uhbiyati, N. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ahmad, N, S. 2011. *Pendidikan Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Sabda Media.
- Arifin, I. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kota Bitung*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arsyad, A. 2003. *Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan & Eksekutif, Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjong, A, A. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan, A, H. 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harvey, D, F. 1982. *Business Policy And Strategic Management*. Ohio: Merril Publishing Co.
- Indra, K, A. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mudyahardjo, R. 2012. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, S. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nisjar, K. dan Winardi. 1997. *Manajemen Strategik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarundajang, S, H. 2011. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S, P. 2005. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarjono, S. 1974. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Syafaruddin. dan Anzizhan. 2004. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Gitamedia Pres.